



RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

*Disampaikan pada Forum PD Tahun 2023
dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2024*

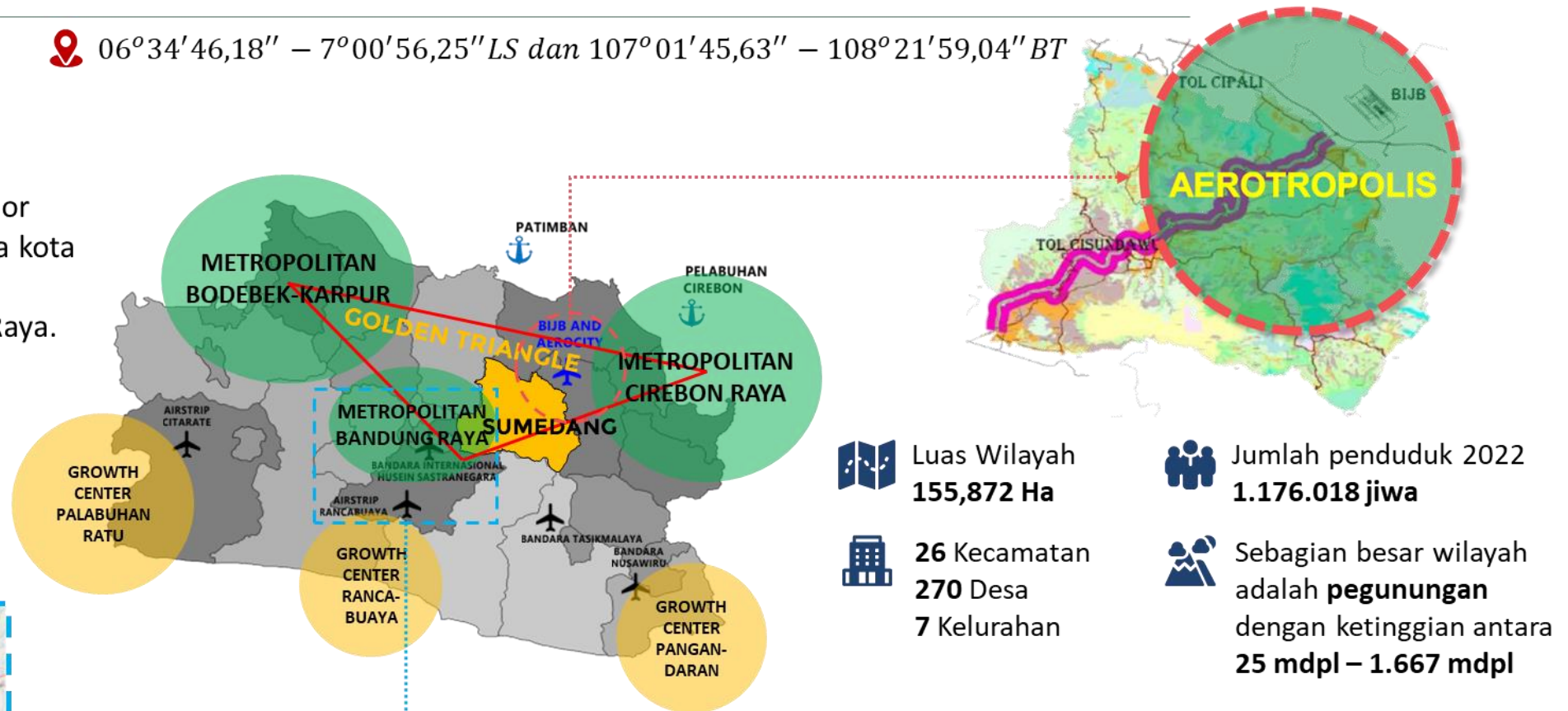


KONDISI GEOGRAFI & DEMOGRAFI

📍 $06^{\circ}34'46,18'' - 7^{\circ}00'56,25''$ LS dan $107^{\circ}01'45,63'' - 108^{\circ}21'59,04''$ BT

GEO-ECONOMY

Sumedang terletak di Koridor Ekonomi Jawa di antara tiga kota Metropolitan Jakarta Raya, Bandung Raya & Cirebon Raya.



Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- Sebelah Timur : Kabuapten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Barat : Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung



KAIDAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2024

RKPD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 MERUPAKAN:

- Dokumen perencanaan 1 tahun
- Penjabaran dari RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026
- Output dari *top down* dan *bottom up planning/partisipatif*

m e n g a c u p a d a :

1.

RPJPD
Kabupaten Sumedang
Tahun 2005-2025

2.

RPD
Kabupaten Sumedang
Tahun 2024-2026

3.

Prioritas dan Tema RKP
Tahun 2024

4.

Arah Kebijakan
Pembangunan
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024



CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR MAKRO

INDIKATOR	2022	TARGET		KETERANGAN & REKOMENDASI 2023
		2022	2023	
IPM (Poin)	72,69	71,9 - 72,4	72,4 - 73,3	Capaian 2022 sudah melampaui target. Komponen IPM perlu diakselerasi, khususnya pada Harapan Lama Sekolah yang tumbuh paling lambat (meningkat 0,01 tahun per tahun dalam 4 tahun terakhir).
Kemiskinan (%)	10,14	10,41 - 9,54	9,70 - 7,56	Capaian 2022 berada dalam range target. Program penanggulangan kemiskinan harus lebih terintegrasi , didukung akurasi data penerima program, dan monitoring serta evaluasi yang terukur .
Pengangguran (%)	7,72	8,78 - 7,99	8,18 - 6,95	Capaian 2022 sudah melampaui target. Untuk mempercepat penurunan kemiskinan perlu menyasar generasi Z , terutama usia lulusan sekolah menengah yang menjadi kelompok rentan pengangguran .
Gini Ratio (Poin)	0,394	0,38 - 0,35	0,37 - 0,34	Capaian 2022 tidak mencapai target. Mengembangkan ekonomi perdesaan bagi kelompok bottom 40 yang umumnya bekerja di sektor pertanian agar pendapatan meningkat .
LPE (%)	5,03	4,70 - 5,70	5,20 - 6,20	Capaian 2022 berada dalam range target. Perlu menjaga iklim usaha yang kondusif untuk sektor utama seperti industri pengolahan dan sektor perdagangan , antisipasi dampak perubahan iklim dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian.
PDRB per Kapita (Juta)	34,46	32,0 - 33,8	33,8 - 34,7	Capaian 2022 sudah melampaui target. Mendorong peningkatan output perekonomian 17 lapangan usaha , mengembangkan pariwisata yang memberikan multiplier effect bagi perekonomian , serta pengendalian jumlah penduduk .



TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2024

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,05-74,17
Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	8,89-9,05
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,06-13,16
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,03-73,33
Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	10.800-11.550
Persentase Kemiskinan	Persen	9,43-7,40
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,67-6,47
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,28-6,28
Gini Ratio	Poin	0,36-0,33
PDRB per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	34,18-36,18



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

1. Pelayanan kesehatan yang belum merata di setiap wilayah;
2. Prevelensi Stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero stunting;
3. Belum meratanya pelayanan pendidikan yang memadai;
4. Pelayanan PPKS yang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya;
5. Daya saing pemberdayaan perempuan yang masih belum optimal;
6. Masih terdapatnya *mismatch* dan *miseducation* antara kompetensi angkatan kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

ISU PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang masih rendah;
2. Ketahanan pangan yang rentan terhadap disrupsi ekonomi;
3. Lambatnya pertumbuhan nilai ekonomi UMKM;
4. Belum optimalnya pemanfaatan kebudayaan daerah dalam menunjang pariwisata;
5. Belum optimalnya Pengembangan dan pembangunan kawasan industri;
6. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan;
7. Belum optimalnya peningkatan nilai Inverstasi Daerah.

ISU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN

1. Belum meratanya Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah;
2. Sebagian besar wilayah yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim;.
3. Belum merata dan terjangkau ketersediaan infrastruktur dasar (Air bersih dan Sanitasi layak)
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
5. Masih tingginya jumlah timbulan sampah yang belum terkelola dengan baik;
6. Belum Optimalnya Penataan Ruang untuk mendukung pengembangan kawasan segitiga Rebana, Cekungan Bandung serta Penanggulangan kawasan Rawan Bencana.

ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

1. Belum Optimalnya tata kelola Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE);
2. Belum optimalnya penguatan penegakan regulasi daerah;
3. Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik
5. Belum optimalnya profesionalisme ASN
6. Belum optimalnya Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam pembangunan daerah



TEMA PEMBANGUNAN

Sumber Daya Manusia dan Digital Ekonomi Unggul, Daya Saing Daerah Punjul





PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN
1.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan2. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan untuk semua3. Peningkatan dan akses dan mutu layanan kesehatan4. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien5. Peningkatan upaya pengendalian penduduk6. Peningkatan peran serta kepemudaan dan olah raga dalam pembangunan7. Peningkatan literasi8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan ketahanan keluarga
2.	Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah2. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi3. Optimasi digitalisasi mekanisme kerja untuk mengakselerasi efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur4. Peningkatan profesionalisme ASN yang menguasai teknologi informasi5. Penerapan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam pembangunan daerah6. Optimalisasi penanganan konflik sosial7. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat



PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN
3.	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas	<ol style="list-style-type: none">1. Stabilisasi Ketahanan Pangan2. Optimalisasi Peningkatan Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan3. Peningkatan Nilai Inverstasi Daerah4. Peningkatan Kunjungan Wisatawan5. Pengembangan pariwisata melalui optimalisasi kebudayaan daerah dan ekonomi kreatif6. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri7. Digitalisasi transaksi Perdagangan dalam efisiensi rantai pasokan8. Peningkatan Infrastruktur dasar yang merata dan terjangkau (penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik dan Sanitasi layak)9. Peningkatan Jalan dan Jembatan10. Mitigasi dan penanggulangan bencana serta Adaptasi Perubahan Iklim.11. Peningkatan Kualitas lingkungan perumahan dan permukiman12. Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan13. Optimalisasi Penataan Ruang untuk mendukung pengembangan kawasan Rebana, Cekungan Bandung serta Penanggulangan kawasan Rawan Bencana14. Pengelolaan Persampahan melalui pemberdayaan masyarakat15. Peningkatan sarana dan prasarana bidang perhubungan
4.	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)2. Optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)3. Optimalisasi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)4. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni5. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sesuai pasar kerja6. Optimalisasi Pengembangan dan Pertumbuhan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)7. Pemberdayaan ekonomi Desa



ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH



Meningkatkan peran teknologi digital dalam mendorong sektor utama perekonomian (Industri, Pertanian, Perdagangan)



Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mudah, dan cepat dengan berbasis TIK



Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi lokal (wisata, perdagangan, pertanian)



Mendorong inovasi dan kolaborasi dalam pengembangan ekonomi lokal



Mengembangkan ekonomi kreatif dan peningkatan nilai tambah produk UMKM



Membangun sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan cakap dalam memanfaatkan teknologi digital, sehingga mengurangi kesenjangan digital di masyarakat

ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH



Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya melalui intensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan sistem pemungutan dan sistem pengawasan serta melakukan penyesuaian kebijakan dengan perkembangan regulasi yang berlaku.



Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya ekstensifikasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah meningkatkan akurasi perhitungan potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber-sumber pendapatan baru.



Dalam rangka digitalisasi Pemerintah Daerah melakukan pembenahan manajemen pemungutan, dengan menggunakan sistem informasi yang kredibel dan akuntabel, sehingga ketersediaan data obyek pajak dan retribusi terintegrasi secara menyeluruh dan transparan.



Mendayagunakan kekayaan atau asset-aset yang *idle*, dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.



Peningkatan Pendapatan Transfer dengan melakukan koordinasi dan konsultasi yang intens antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.



ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

1. PEMENUHAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
2. PEMENUHAN BELANJA *MANDATORY SPENDING*
3. PENDANAAN PILKADA SERENTAK PADA TAHUN 2024
4. PEMENUHAN SECARA BERTAHAP PROSENTASE BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA INFRASTRUKTUR SESUAI UU 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERUNTAH DAERAH
5. PENDANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA
6. MENINGKATKAN PENERIMAAN DAERAH PADA SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH
7. SINKRONISASI DATA TERKAIT INDIKATOR-INDIKATOR UNTUK PENINGKATAN DATA TRANSFER KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG



PROYEKSI DAN TARGET APBD TAHUN 2023-2024

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2023	TARGET RKPD TAHUN 2024
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	625.007.877.571,00	704.184.540.664,00
Pendapatan Transfer	2.169.740.390.285,00	2.402.425.737.797,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.074.482.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.796.822.749.856,00	3.106.610.278.461,00
BELANJA		
Belanja Operasi	2.134.972.336.184,00	1.941.323.996.881,00
Belanja Modal	217.570.638.977,00	715.091.867.200,00
Belanja Tak Terduga	13.155.296.795,00	30.000.000.000,00
Belanja Transfer	429.624.477.900,00	461.194.414.380,00
JUMLAH BELANJA	2.795.322.749.856,00	3.147.610.278.461,00
Surplus/(Defisit)	1.500.000.000,00	(41.000.000.000,00)
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan		
SilPA	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan		
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal	6.500.000.000,00	14.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	(1.500.000.000,00)	1.000.000.000,00



PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2024

1. PEMANFAATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (JALAN TOL CISUMDAWU, JATIGEDE, CEKUNGAN BANDUNG, KAWASAN REBANA)
2. PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI BUTOM
3. KECAMATAN VOKASI DI KAWASAN BUTOM
4. PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT KETENAGAKERJAAN DI KAWASAN REBANA
5. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA DAN WILAYAH PERBATASAN
6. PENANGGULANGAN BENCANA
7. PENANGANAN ZERO NEW STUNTING
8. PEMATANGAN LAHAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT MEKARASIH JATIGEDE
9. PENATAAN KAWASAN KECAMATAN UJUNGJAYA
10. PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAHAN DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN SUMEDANG
11. BALAI LATIHAN KERJA INTEGRASI UJUNGJAYA
12. PENATAAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR



PAGU INDIKATIF SEKTORAL TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	URAIAN	PAGU	KETERANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	8.828.967.132,40	
2	Penunjang Urusan	4.835.157.860,00	
3	Fixed Cost	3.581.307.734,00	Penyusunan RKPD, RPJPD dan RPJMD (Setiap Bidang)
4	Prioritas Urusan Lainnya	1.866.997.406,00	Diprioritaskan untuk menjawab permasalahan pada Tahun 2022, dan dapat disesuaikan dengan target prioritas pada Tahun 2024
TOTAL PAGU		19.112.430.132,40	



PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL TAHUN 2024

- a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial, dengan mempedomani Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri tentang Standar Teknis pelayanan setiap Bidang.
- b. Mendanai kegiatan unggulan/strategis Perangkat Daerah yang mendukung Mendukung Opat masagi Kalima pacer yang harus di perhatikan:
Opat masagi, yaitu:
 1. Ketahanan Pangan Daerah
 2. Hilirasi industry dan agro bisnis
 3. Digitalisasi ekonomi dan literasi digital
 4. Akselerasi kabupaten pariwisata**Kalima Pancer, yaitu:**
 5. Cross fire program penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting sebagai prioritas layanan dasar pemerintahan.
- c. Mendanai kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Tahun 2022, berdasarkan permasalahan dan isu pelayanan Perangkat Daerah.
- d. Mendanai usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang disetujui dan masuk skala prioritas Perangkat Daerah berdasarkan pagu yang tersedia.
- e. Mendukung Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2024
- f. Mendukung program/kegiatan Strategis Provinsi dan Pusat



Terima Kasih

   BAPPPEDA SUMEDANG